



# ASPIRASI **kita**

**EDISI 7-  
JULI  
2025**



**Fraksi PKS  
Setujui RPJMD  
Jatim  
2025-2029,  
Dorong Ketahan  
an Keluarga dan  
Pemerataan  
Wilayah**



## **FRAKSI PKS SETUJUI RPJMD JATIM 2025–2029, DORONG KETAHANAN KELUARGA DAN PEMERATAAN WILAYAH**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Senin (7/7). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Agus Cahyono, Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Jatim 9 (Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Ngawi), yang ditunjuk sebagai juru bicara Fraksi PKS dalam menyampaikan Pendapat Akhir (PA) fraksi.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS menyetujui Raperda RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Fraksi PKS berharap RPJMD ini menjadi pedoman pembangunan yang selaras antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Agus Cahyono.



“

***“Ketahanan keluarga adalah fondasi pembangunan. Fraksi PKS mendorong sinergi kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, pesantren, tokoh agama, dan organisasi masyarakat,” tegas Agus.***

Fraksi PKS mengapresiasi visi pembangunan yang diusung dalam dokumen RPJMD, yaitu "Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045." Namun, Fraksi PKS menekankan bahwa visi besar ini tidak boleh berhenti sebagai slogan atau "visi langit", melainkan harus dibumikan secara nyata melalui kebijakan yang konsisten dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Agus menegaskan bahwa seluruh kebijakan, baik anggaran maupun non-anggaran, harus berorientasi pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara optimal hingga tahun 2029. Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi yang telah memasukkan isu ketahanan keluarga dalam RPJMD. Namun, dalam implementasinya, PKS mendorong agar segera disusun dan dibahas Raperda tentang Ketahanan Keluarga sebagai payung hukum dalam penguatan keluarga di Jawa Timur. Selain itu, PKS juga mendorong perhatian lebih terhadap perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta penguatan UMKM berbasis keluarga di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam hal pemerataan pembangunan, Fraksi PKS menyoroti masih adanya ketimpangan antarwilayah di Jawa Timur. Agus menyebutkan bahwa ada 23 kabupaten/kota yang indeks pembangunan manusianya (IPM) masih di bawah rata-rata provinsi, yakni di bawah angka 75,35 pada tahun 2024. "Daerah-daerah seperti Madura, Tapal Kuda, Lingkar Selatan, dan Pantura membutuhkan afirmasi kebijakan pembangunan. RPJMD harus hadir sebagai solusi, bukan hanya program tahunan, tetapi strategi jangka menengah yang menyentuh wilayah yang selama ini tertinggal," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim itu.

Fraksi PKS juga meminta agar sektor pertanian di daerah-daerah berpendapatan rendah segera didorong untuk tumbuh melalui kebijakan afirmatif, pengembangan industri berbasis pertanian, dan pemetaan ekonomi wilayah yang terpadu. Dalam aspek pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, Fraksi PKS mengapresiasi optimisme peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun mengingatkan agar tidak membebani masyarakat kecil. PKS juga menyoroti menurunnya proyeksi pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah melalui BUMD, dan mendorong dilakukannya restrukturisasi dan penguatan tata kelola BUMD agar dapat lebih memberikan kontribusi nyata terhadap PAD dan pelayanan publik.

Terkait belanja daerah, Fraksi PKS mengapresiasi peningkatan belanja modal, namun mendorong agar trennya tidak stagnan. Belanja modal harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran terbuka. Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya penguatan sektor ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan lembaga seperti KNEKS, IAEI, dan industri halal perlu ditingkatkan agar ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Dalam sektor pertanian, perikanan, dan maritim, Fraksi PKS mendorong peningkatan nilai tukar petani dan nelayan serta mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Jawa Timur dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan nasional dan pemain utama dalam ekonomi biru (blue economy). Fraksi PKS juga mendorong pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan kekuatan sosial-budaya lokal. Salah satu kritik yang disampaikan adalah belum adanya sistem informasi terpadu atau “jendela wisata” yang menampilkan kekayaan destinasi wisata Jatim secara lengkap. Infrastruktur yang masih minim juga menjadi penghambat pengembangan sektor ini.

“Pariwisata harus memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga harmoni sosial-budaya di daerah wisata. Tidak boleh ada konflik sosial yang muncul karena pembangunan pariwisata yang tidak berpihak pada masyarakat lokal,” pungkas legislator PKS itu. Menutup pendapat akhir Fraksi PKS, Agus Cahyono menegaskan bahwa RPJMD harus mampu menyatukan arah perencanaan dan penganggaran di semua tingkatan agar pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat. “RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen bersama. Kami berharap Pemerintah Provinsi mampu menjalankannya dengan responsif, adaptif, dan penuh keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.

## PEMUDA HIDAYATULLAH JATIM KUNJUNGI **FRAKSI PKS** DPRD JATIM, BAHAS KOLABORASI DAN PERAN KEPEMUDAAN

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menerima kunjungan dari Pemuda Hidayatullah Jawa Timur, Jumat (4/7/2025). Rombongan diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, di ruang Fraksi PKS DPRD Jatim. Kunjungan ini menjadi momen penting untuk menjalin silaturahmi dan membuka peluang kolaborasi antara dua elemen yang sama-sama peduli terhadap masa depan bangsa.

Lilik Hendarwati mengungkapkan apresiasinya atas kedatangan Pemuda Hidayatullah ke DPRD Jatim. Ia menyebut pertemuan ini bukan sekadar temu formal, tetapi juga sebagai ajang untuk berbagi gagasan dan membangun sinergi, khususnya dalam isu-isu kepemudaan dan pembangunan daerah.

Ia juga berharap kunjungan ini bisa memperluas wawasan anak-anak muda terhadap dunia politik dan pemerintahan, serta mendorong mereka untuk lebih aktif menyampaikan aspirasi demi kemajuan Jawa Timur.





***Hari ini saya menerima tamu dari Pemuda Hidayatullah yang baru kali pertama hadir di Fraksi PKS. Tujuan mereka tentu untuk bersilaturahmi, berbagi informasi, dan mencari peluang kolaborasi, terutama terkait aktivitas kepemudaan. Kami di DPRD Jatim memiliki banyak program yang bisa disinergikan," ujar Anggota Komisi C DPRD Jatim itu.***

Sementara itu, perwakilan Pemuda Hidayatullah Jatim, Muhammad Faruq, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari ikhtiar membangun kolaborasi positif antar elemen bangsa.

"Alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi ke DPRD Jatim, khususnya ke Ibu Lilik Hendarwati selaku Ketua Fraksi PKS. Ini bagian dari upaya menjalin sinergi, karena kami memiliki program dan visi yang sejalan dengan PKS. Tujuannya tentu untuk Indonesia yang lebih baik," ungkap Faruq.

Faruq juga menambahkan bahwa pihaknya merasa memiliki kedekatan dengan sosok Lilik Hendarwati, yang dikenal konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya di Surabaya. Menurutnya, keterlibatan anak muda dalam bidang sosial dan politik menjadi penting untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan.

Pertemuan ini ditutup dengan semangat kolaborasi dan harapan agar silaturahmi ini menjadi awal dari kerja-kerja bersama yang berdampak nyata bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia secara umum.

## STAND UP PADDLE BANGKALAN DIANGGAP BERPOTENSI, LILIK HENDARWATI DORONG BUMD KELOLA SPORT TOURISM



Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur yang juga anggota Komisi C, Lilik Hendarwati, menerima kunjungan dua pengurus Stand Up Paddle Indonesia Pengurus Provinsi Jawa Timur di ruang Fraksi PKS DPRD Jatim, Rabu (16/7). Mereka adalah Christian Yoseph selaku Sekretaris Umum dan Ali Yusa sebagai Wakil Ketua Umum.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya memaparkan perkembangan olahraga air Stand Up Paddle di Jawa Timur, termasuk potensi wisata baru yang tengah dikembangkan di wilayah Bangkalan, Madura. Christian dan Ali juga menyampaikan harapan agar Lilik bersedia menjadi pembina komunitas tersebut.

"Ini menarik sekali karena ternyata mereka membuka spot Stand Up Paddle di salah satu lokasi di Bangkalan. Tempat ini bukan hanya menjadi arena olahraga, tapi juga punya potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata," kata Lilik.

Sebagai anggota Komisi C yang membidangi keuangan dan aset daerah, Lilik menilai pengembangan sport tourism seperti ini dapat menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.

"Jawa Timur punya banyak lokasi potensial, baik untuk wisata air, desa wisata, kuliner, maupun aset-aset milik daerah yang belum tergarap maksimal. Kalau ini dikelola dengan serius, bisa memberikan kontribusi nyata terhadap PAD kita," jelas legislator PKS itu.

Lilik bahkan mendorong agar pemerintah provinsi mulai memikirkan skema pengelolaan yang lebih strategis dan profesional melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ia juga mendorong sinergi antara Pemprov, pemerintah desa melalui BUMDes, pelaku usaha lokal, CSR perusahaan, hingga investor untuk mengembangkan sektor sport tourism di berbagai daerah, termasuk Bangkalan.

"Desa wisata yang dikembangkan bersama komunitas dan pelaku olahraga seperti ini bisa mempercepat pemerataan ekonomi di daerah. Bangkalan bisa menjadi contoh model integrasi antara wisata, olahraga, dan pemberdayaan masyarakat," pungkasnya.



***"Sport tourism ini bukan sekadar tren, tapi peluang bisnis. Pemerintah bisa membentuk BUMD khusus yang mengelola sektor wisata, termasuk wisata berbasis olahraga seperti Stand Up Paddle ini. Dengan pengelolaan profesional, dampaknya bisa besar," ungkap Lilik.***



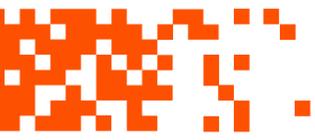
Ketua Fraksi PKS  
DPRD Provinsi  
Jawa Timur

# HJ. LILIK HENDARWATI

**KOMISI C**  
(KEUANGAN)

BADAN ANGGARAN (BANGGAR)  
BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)





## **DUKUNG PEMUTIHAN PAJAK MOTOR, LILIK HENDARWATI: INI KEADILAN UNTUK RAKYAT DAN PEKERJA**

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberikan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga mendapat dukungan dari Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati.

Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, khususnya kalangan pekerja, pelaku UMKM, dan petani yang menjadikan sepeda motor sebagai alat utama mobilitas sehari-hari. "Saya menyambut baik kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut politisi Fraksi PKS ini, sepeda motor bukan hanya alat transportasi, tapi juga alat produktivitas yang menopang ekonomi keluarga. Maka, ketika pemerintah memberi ruang keringanan bagi rakyat untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa beban denda, itu menjadi bentuk keadilan fiskal yang patut diapresiasi.



Di sisi lain, Lilik juga memahami keputusan Pemprov Jatim untuk tidak menyertakan kendaraan roda empat dalam program pemutihan kali ini. Ia menilai, hal itu merupakan bentuk keadilan sosial yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi.

“Para pemilik kendaraan roda empat, yang umumnya berasal dari kelompok ekonomi menengah ke atas, justru memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak,” jelas Ketua Fraksi PKS Jatim itu.

Lilik menekankan bahwa pajak bukan hanya urusan administrasi, tetapi merupakan kontribusi langsung masyarakat terhadap pembangunan daerah, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Dengan kata lain, yang mampu membantu yang belum mampu; yang kuat menopang yang lemah. Maka, saat sebagian masyarakat mendapat keringanan melalui pemutihan, yang lain menunjukkan kepeduliannya dengan tetap taat pajak,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk menyambut baik kebijakan ini, dan berharap tercipta semangat gotong royong fiskal yang kuat di tengah masyarakat.

“Kita butuh kolaborasi dan gotong royong fiskal seperti ini untuk membangun Jawa Timur yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

***Ini adalah langkah konkret yang mencerminkan keberpihakan pada masyarakat kecil, khususnya pemilik sepeda motor yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas rakyat pekerja, pelaku UMKM, dan petani,” kata Lilik.***

“



## LILIK HENDARWATI MASUK 10 BESAR DPRD JATIM TERBAIK VERSI THE REPUBLIC INSTITUTE, INI KOMITMENNYA UNTUK RAKYAT

Kinerja wakil rakyat DPRD Jawa Timur kembali mendapat sorotan positif dari publik. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh The Republic Institute, publik Jawa Timur menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap kinerja anggota DPRD Provinsi. Survei tersebut menilai tiga aspek utama: Legislasi, Pengawasan dan Integritas, serta Representasi dan Aspirasi Konstituen, dengan skala penilaian 0 hingga 10.

Dari hasil survei tersebut, Lilik Hendarwati, anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Ketua Fraksi, tercatat masuk dalam 10 besar anggota DPRD Jatim dengan kinerja terbaik. Menanggapi hasil survei itu, Lilik menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada masyarakat Jawa Timur atas kepercayaan yang telah diberikan.

***“Alhamdulillah, saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan, penerimaan, dan apresiasi masyarakat sebagaimana tercermin dalam hasil survei The Republic Institute yang menempatkan saya sebagai salah satu dari 10 anggota DPRD Jawa Timur dengan kinerja terbaik,” ujar Lilik.***

“





Ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah pengingat dan penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian. “Sesungguhnya saya hanya menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai wakil panjenengan semuanya. Pencapaian ini saya anggap sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri, memperkuat amanah, dan memperluas kebermanfaatannya,” tambahnya.

Menurut Lilik, kepercayaan publik merupakan titipan amanah yang harus dijaga dengan kerja nyata, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat, terutama kelompok rentan yang masih membutuhkan keberpihakan nyata dalam kebijakan publik. Ia juga menyampaikan bahwa kinerja seorang wakil rakyat tidak bisa dilepaskan dari dukungan banyak pihak.

“Saya menyadari bahwa kinerja seorang anggota dewan adalah hasil dari sinergi, masukan dari masyarakat, kolaborasi dengan rekan sejawat, kerja sama dengan pemerintah, serta doa dan dukungan dari keluarga dan sahabat perjuangan. Apresiasi ini saya dedikasikan untuk semua pihak yang terus mendampingi langkah pengabdian ini. Di akhir pernyataannya, Lilik mengajak semua pihak untuk terus bersama-sama membangun Jawa Timur yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera.

“Mari kita jadikan ruang demokrasi sebagai ruang belajar, ruang bertumbuh, dan ruang melayani dengan hati. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing setiap langkah kita agar tetap berpijak pada kejujuran dan keberpihakan pada kebaikan.” Masuknya Lilik Hendarwati ke dalam daftar 10 besar ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa kinerja anggota legislatif yang konsisten, responsif, dan berpihak pada rakyat akan selalu mendapat tempat di hati masyarakat.



Sekretaris Fraksi PKS  
DPRD Provinsi  
Jawa Timur

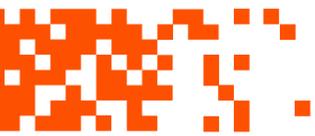
# **Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, MM**

**KOMISI E**

**(KESRA)**

**BADAN KEHORMATAN (BK)**





## **PUGUH WIJI PAMUNGKAS AJAK KARANG TARUNA JADI GARDA TERDEPAN PERUBAHAN SOSIAL**

Komitmen membangun peran generasi muda dalam pembangunan daerah kembali ditunjukkan oleh Puguh Wiji Pamungkas, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Lewat forum aspiratif yang digelar di Aula RSU Wajak Husada, Kamis (3/7).

Puguh membuka ruang dialog bersama perwakilan Karang Taruna Kabupaten Malang. Forum ini menjadi momentum strategis mempererat sinergi antara pemuda, legislatif, dan lembaga sosial untuk menjawab tantangan sosial kemasyarakatan.

Forum yang dihadiri oleh tokoh pemuda sekaligus Sekretaris Karang Taruna Provinsi Jawa Timur, Twiadi, yang juga menjabat sebagai Koordinator TAGANA Jatim, menghasilkan berbagai gagasan konstruktif.



***“Pemuda harus punya ruang untuk bersuara dan bergerak. Tugas kami di legislatif adalah membuka jalur-jalur strategis itu agar Karang Taruna makin berdaya dan berdampak nyata di masyarakat,” tegas Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu.***

Di antaranya adalah usulan peningkatan kapasitas SDM pemuda, penguatan ekonomi kreatif berbasis lokal, serta keterlibatan aktif Karang Taruna dalam program tanggap bencana dan pembangunan desa.

Dalam sambutannya, Puguh menegaskan bahwa Karang Taruna adalah garda terdepan dalam pembangunan sosial berbasis komunitas. Menurutnya, peran pemuda harus melampaui kegiatan seremonial dan diarahkan sebagai agen perubahan sosial yang konkret.

Pria yang dikenal sebagai Malang Local Hero ini juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemuda dan para pemangku kepentingan. Ia menyambut baik inisiatif Karang Taruna yang aktif di bidang sosial-kemanusiaan, mulai dari isu kesehatan, pemberdayaan UMKM, hingga penanganan stunting di wilayah-wilayah terpencil.

Forum ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat jaringan kepemudaan berbasis desa dan kecamatan di seluruh Kabupaten Malang. Sinergi ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret menuju pembangunan daerah yang lebih inklusif dan partisipatif, dengan pemuda sebagai motor penggeraknya.

## MAHASISWA UPN DORONG DPRD JATIM PUNYA INSTRUMEN AWASI PERBINCANGAN MASYARAKAT, PUGUH: INI MENDUKUNG TUGAS LEGISLASI

Perkembangan teknologi komunikasi digital yang semakin pesat menjadi sorotan dalam kunjungan akademik mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur ke DPRD Provinsi Jawa Timur, Kamis (10/7/2025).

Dalam kegiatan bertajuk *Cyber PR Goes to DPRD*, sekitar 90 mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Jatim bersama sejumlah dosen mendatangi kantor DPRD Jatim dan berdialog langsung dengan Anggota Komisi E dari Fraksi PKS, Puguh Wiji Pamungkas.

Diskusi berlangsung dinamis dengan tema besar “Peran Strategis Komunikasi Digital dalam Meningkatkan Kredibilitas dan Akuntabilitas Lembaga Legislatif.”

Dalam forum tersebut, para mahasiswa menyampaikan gagasan penting agar DPRD Jatim memiliki instrumen analisis digital guna memantau dan memahami percakapan publik di ruang digital, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan dewan dengan aspirasi masyarakat.

***“Ini usulan yang menarik dan sangat penting. Analisa aktivitas digital masyarakat bisa menjadi jembatan agar DPRD tahu apa yang sedang dipikirkan dan dibutuhkan publik,” ujar Puguh Wiji Pamungkas.***



Menurutnya, literasi digital bagi anggota dewan tidak bisa diabaikan, mengingat masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh tren digital. Tanpa instrumen yang mampu membaca dinamika digital, dikhawatirkan lembaga legislatif akan kehilangan arah dalam menyerap aspirasi yang relevan.

“Kita sekarang hidup di zaman di mana digital mendrive pikiran manusia. Kalau anggota dewan tidak tahu apa yang sedang diperbincangkan masyarakat, bagaimana bisa tepat dalam mengambil kebijakan?” tegas legislator PKS itu.

Puguh juga menegaskan bahwa DPRD Jatim saat ini sudah mulai memanfaatkan berbagai platform digital seperti website resmi dan media sosial untuk publikasi kinerja para anggota. Namun, ia mengakui bahwa ke depan perlu ada penguatan pada aspek analitik dan pemetaan isu digital secara lebih sistematis.

“Alhamdulillah, diskusi hari ini memperkaya wawasan kita semua. DPRD sebagai lembaga publik harus semakin adaptif, transparan, dan responsif. Instrumen digital bukan sekadar alat, tapi bagian dari strategi menyeluruh dalam mendukung fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” pungkas pria yang kerap dipanggil Doktor Puguh itu. Kunjungan ini tidak hanya menjadi pengalaman lapangan bagi para mahasiswa, tetapi juga menjadi refleksi penting bagi DPRD Jatim untuk terus berinovasi dalam hal komunikasi publik dan keterbukaan informasi.





Bendahara Fraksi PKS  
DPRD Provinsi  
Jawa Timur

**HARISANDI SAVARI,  
S.PT, ST**

**KOMISI D  
(PEMBANGUNAN)  
BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)**





## INSIDEN KMP TUNU, HARISANDI DORONG PEMERINTAH EVALUASI KELAYAKAN KAPAL

Insiden tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali memicu keprihatinan mendalam dari Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari. Legislator asal daerah pemilihan Madura itu menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan kapal penumpang dan barang demi mencegah tragedi serupa terulang.

“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan sidak ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Meskipun pengelolaan pelabuhan umumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, tapi Pemprov Jatim juga memiliki dermaga di sana yang dikelola ASDP,” ujar Harisandi. Menurut Harisandi, aspek keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama. Ia mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap usia operasional kapal, karena kapal yang sudah terlalu tua memiliki risiko tinggi mengalami kerusakan hingga kecelakaan di laut.

Hingga Kamis siang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mencatat 31 orang selamat dan lima orang meninggal dunia dalam insiden yang terjadi pada Rabu (2/7) pukul 23.35 WIB. Dari lima korban meninggal, tiga di antaranya merupakan warga Jawa Timur: Eko Satriyo (51) dan Elok Rumantini (34) asal Banyuwangi, serta Anang Suryono (59) asal Probolinggo. Dua korban lainnya yakni Cahyani (45) asal Jawa Tengah dan Fitri April Lestari (33), juga warga Banyuwangi.

Dugaan sementara menyebutkan kapal mengalami kebocoran di ruang mesin sebelum akhirnya terbalik dan tenggelam. Total penumpang dan awak yang berada di kapal saat kejadian berjumlah 78 orang.

Harisandi juga menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum bagi seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memperkuat pengawasan terhadap armada kapal penyeberangan, terutama yang beroperasi di jalur-jalur vital seperti Selat Bali.

“Kejadian ini bukan hanya soal cuaca atau teknis mesin, tapi soal sistem. Pemerintah harus hadir dengan regulasi dan pengawasan yang ketat, agar keselamatan masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut benar-benar terlindungi,” pungkasnya. Proses pencarian dan evakuasi korban yang belum ditemukan masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di sekitar lokasi tenggelamnya kapal.

***“Perlu ada standar nasional yang tegas terkait batas usia kapal. Pemeriksaan rutin dan kewajiban mengganti kapal tua harus menjadi bagian dari regulasi keselamatan pelayaran,” tegasnya.***



## DPRD JATIM APRESIASI INPRES JALAN DAERAH, **HARISANDI** MINTA PERBAIKAN MASIF DI MADURA



Keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Peningkatan Jalan Daerah disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk oleh DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi D DPRD Jatim Harisandi Savari menyatakan bahwa Inpres ini menjadi angin segar bagi perbaikan infrastruktur, khususnya jalan-jalan kabupaten/kota yang selama ini kondisinya masih jauh dari ideal.

“Inpres ini adalah langkah konkret pemerintah pusat dalam mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah, terutama untuk mendukung swasembada pangan dan energi nasional,” ujar Harisandi, Rabu (23/7/2025).

Politisi PKS asal Madura ini mengungkapkan bahwa kondisi jalan daerah di Jawa Timur, termasuk Madura, memang masih memprihatinkan. Dari total 480 ribu kilometer jalan daerah secara nasional, hanya sekitar 42% yang dalam kondisi mantap. Ia pun menyebut, Inpres ini menjadi payung hukum yang kuat untuk mendorong percepatan pembangunan dan perbaikan jalan daerah.

***“Khusus di Madura, kondisi jalan sangat bervariasi. Banyak ruas jalan yang rusak, terutama di daerah pedesaan dan jalur provinsi. Kerusakan ini berupa lubang, aspal mengelupas, hingga jalan bergelombang. Ini sangat membahayakan, khususnya bagi pengendara sepeda motor,” paparnya.***



Ia mencontohkan kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Raya Tanjung, Sampang, akibat aktivitas pasar ikan yang tidak tertata dengan baik. Tak hanya itu, di perbatasan Pamekasan-Sumenep, terdapat ruas jalan sepanjang 3 kilometer yang berlubang dan bergelombang, minim penerangan, serta sering tergenang air. “Kerusakan semacam ini terutama berbahaya di malam hari, dan sudah menyebabkan banyak kecelakaan karena pengendara terperosok atau gagal mengantisipasi kondisi jalan,” tambah Harisandi yang juga Ketua Kadin Pamekasan.

Dengan adanya Inpres ini, Harisandi mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk bekerja sama melakukan perbaikan secara masif, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah. “Peningkatan kualitas jalan sangat penting untuk konektivitas desa-kota, memperlancar aktivitas ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Ini kebutuhan mendesak masyarakat Madura,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat dengan Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur jalan daerah. Ia menginstruksikan agar persoalan jalan kabupaten dan kota yang masih dalam kondisi buruk segera ditangani secara serius. Saat ini, kemantapan jalan kabupaten/kota baru mencapai 40%, jalan provinsi 60%, sementara jalan nasional telah mencapai di atas 90%. “Inpres ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas infrastruktur jalan di Madura. Jangan sampai ketimpangan ini terus terjadi. Perbaikan jalan bukan sekadar proyek fisik, tapi juga soal keselamatan dan masa depan ekonomi masyarakat,” pungkas Harisandi.



Anggota Fraksi PKS  
DPRD Provinsi  
Jawa Timur

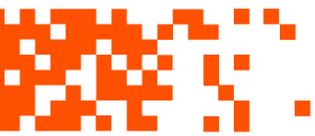
# H AGUS CAHYONO, SHI, MHI



**KOMISI A**  
(PEMERINTAHAN)

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH (BAPEMPERDA)**





Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi dan konsultasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI. Fokus utama kunjungan ini adalah meminta kejelasan mengenai regulasi pengisian kekosongan kepala desa yang saat ini terjadi di Jawa Timur.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Cahyono menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 125 desa di Jawa Timur yang mengalami kekosongan jabatan kepala desa, baik karena masa jabatan telah berakhir maupun karena alasan lainnya. Namun proses pengisian antarwaktu (PAW) maupun pemilihan kepala desa (Pilkades) belum dapat dilaksanakan karena menunggu aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.



**125 DESA TANPA  
KADES, KOMISI A  
DPRD JATIM  
KUNJUNGI  
KEMENDAGRI, AGUS  
CAH: KAMI MINTA  
KEPASTIAN  
REGULASI KE PUSAT**

“Kunjungan Komisi A ke Jakarta pertama ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, kemudian dilanjutkan ke Komisi II DPR RI. Dua tema utama yang kami bawa adalah terkait penundaan PAW dan Pilkades. Saat ini di Jatim ada 125 desa yang mengalami kekosongan kepala desa,” ujar Agus Cah, Kamis (10/7/2025).

Menurut informasi dari Kemendagri, proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU Desa yang baru tersebut sudah hampir final. Namun belum dapat diterbitkan karena masih dalam tahap harmonisasi akhir.

“RPP sudah semifinal, tinggal menunggu. Sementara dari Komisi II DPR RI kami mendapat informasi bahwa FGD antara DPR dan Kemendagri sudah dilakukan, dan ditargetkan maksimal Oktober 2025 PP tersebut sudah bisa diterbitkan,” terang pria asal Trenggalek itu.

Ia menegaskan bahwa keterlambatan regulasi ini berdampak langsung pada jalannya roda pemerintahan desa. Kekosongan kepemimpinan membuat berbagai program desa tertunda dan pelayanan publik tidak berjalan optimal.

“Kami minta pemerintah pusat segera memberi kepastian. Desa-desa tidak bisa terlalu lama tanpa kepala desa definitif. Ini bukan hanya soal kekuasaan, tapi soal pelayanan publik yang menyentuh langsung masyarakat,” katanya.

Komisi A DPRD Jatim juga meminta pemerintah kabupaten di Jawa Timur untuk bersiap sejak dini, agar setelah PP diterbitkan, tahapan Pilkades dan PAW bisa langsung dijalankan tanpa hambatan teknis maupun anggaran.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Jatim dalam memperjuangkan aspirasi daerah dan memastikan jalannya pemerintahan desa tetap berjalan sesuai harapan masyarakat.





## **KONFLIK 16 PULAU, KOMISI A DPRD JATIM DESAK PENYELESAIAN SENGKETA TRENGGALEK–TULUNGAGUNG**

Komisi A DPRD Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Komisi II DPR RI untuk membahas salah satu persoalan tapal batas yang hingga kini belum terselesaikan, yakni konflik wilayah atas 16 pulau yang menjadi sengketa antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Cahyono, menyampaikan bahwa konflik batas wilayah ini sebenarnya sudah memasuki tahap akhir penyelesaian. Format penyelesaian pun sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tinggal menunggu komitmen dari para pemangku kebijakan di daerah untuk duduk bersama dan mengambil keputusan final.



***“Ini soal kepastian wilayah dan pelayanan publik. Kita tidak bisa membiarkan konflik semacam ini terus menggantung. Semua pihak seharusnya memiliki semangat yang sama untuk menyelesaikannya secara adil dan transparan,” tegas Agus.***



“Kunjungan ke Komisi II DPR RI kali ini membahas permasalahan konflik 16 pulau antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Sebetulnya, dari pihak Kemendagri sudah menyiapkan format penyelesaian yang jelas,” ujar Agus Cah saat dikonfirmasi, Kamis (10/7/2025).

Pria asal Trenggalek itu menjelaskan bahwa keputusan final nantinya akan dibawa ke forum bersama yang melibatkan Bupati dan Ketua DPRD dari kedua kabupaten, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur—baik Gubernur maupun Sekretaris Daerah. Forum ini dirancang sebagai ruang dialog penentu kebijakan demi menghindari konflik berkepanjangan antarwilayah.

“Sebenarnya tinggal menunggu kesediaan para pejabat untuk hadir. Format sudah ada, dan hasil kajian dari Kemendagri juga sudah siap disampaikan. Hanya saja, kemarin belum bisa diagendakan karena Ibu Gubernur dan Bapak Sekda masih memiliki kesibukan,” tambahnya.

Komisi A DPRD Jatim menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian konflik tersebut agar tidak menimbulkan ketegangan antarwarga dan tidak menghambat pembangunan di kawasan yang bersengketa.

Ia berharap, dalam waktu dekat pertemuan bersama dapat segera dijadwalkan ulang, agar proses mediasi yang telah difasilitasi pemerintah pusat benar-benar menghasilkan keputusan konkret demi kepastian hukum dan ketertiban wilayah di Jawa Timur.

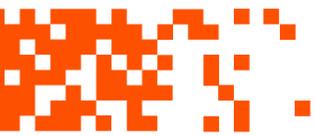


Anggota Fraksi PKS  
DPRD Provinsi  
Jawa Timur

# **DRS. H. M KHUSNUL KHULUK**

**KOMISI B**  
**(PEREKONOMIAN)**  
**BADAN ANGGARAN (BANGGAR)**



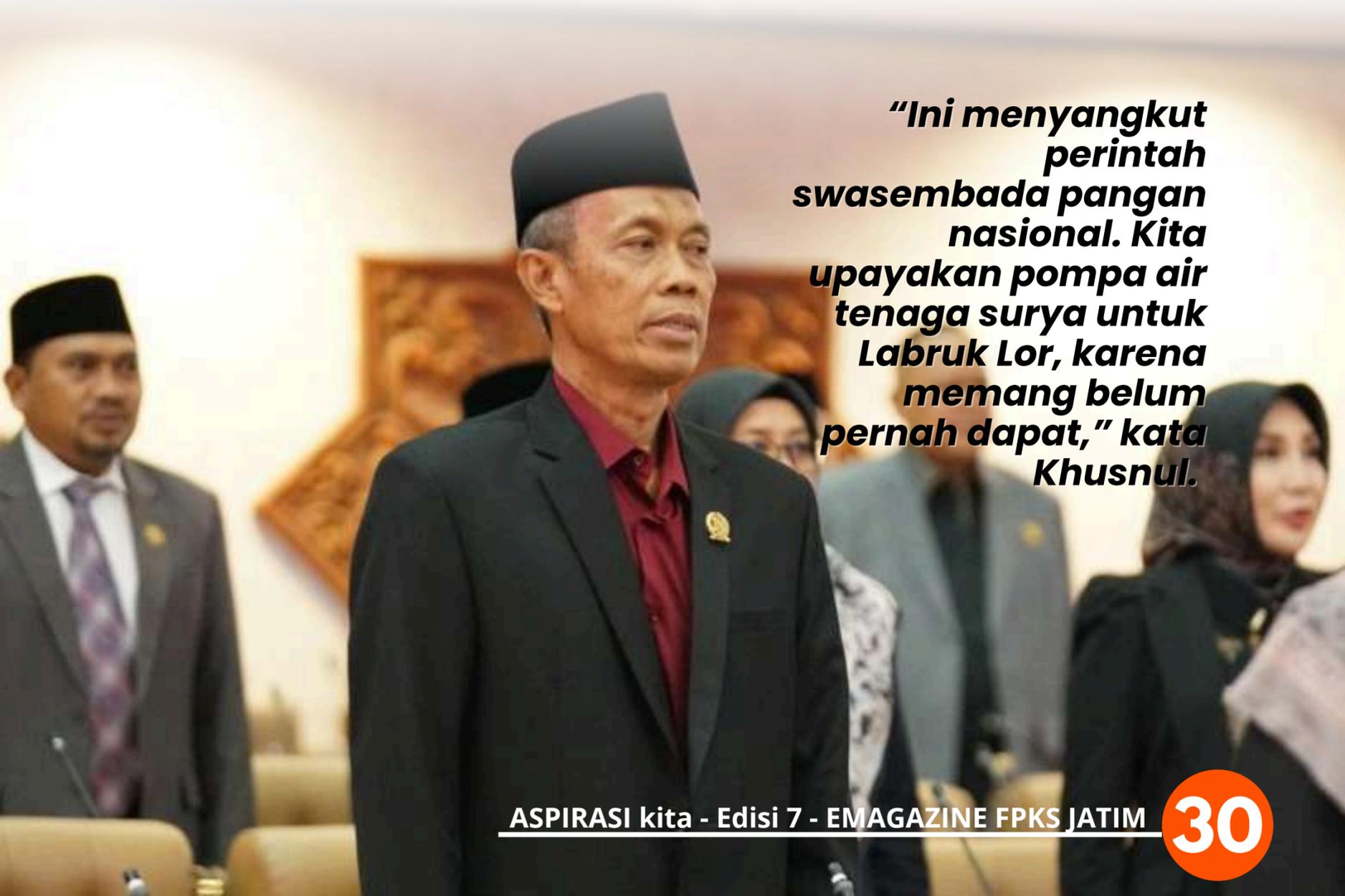


## WUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN, **KHUSNUL KHULUK** DORONG PEMERINTAH ATUR POLA TANAM DAN PENUHI KEBUTUHAN PETANI

Anggota DPRD Jawa Timur, Husnul Khuluk, mendengarkan langsung keluhan warga Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, dalam agenda Reses II Tahun 2025. Sejumlah persoalan strategis disampaikan warga, mulai dari kerusakan lahan akibat hama tikus, krisis air irigasi, hingga kebutuhan peralatan untuk mendukung pelaku UMKM.

Salah satu persoalan mendesak yang diungkap warga adalah serangan hama tikus yang merusak lahan pertanian dan mengganggu hasil panen. Warga berharap ada langkah konkret dari pemerintah agar serangan hama bisa diminimalisir.

“Lahan kami sering dirusak oleh hama tikus. Mohon perhatian agar tanaman kami tidak terus-menerus rusak,” keluh seorang warga.



***“Ini menyangkut perintah swasembada pangan nasional. Kita upayakan pompa air tenaga surya untuk Labruk Lor, karena memang belum pernah dapat,” kata Khusnul.***

Krisis air irigasi juga menjadi perhatian utama. Warga mengusulkan pengadaan pompa air tenaga surya untuk membantu pengairan sawah mereka. Menanggapi hal tersebut, Khusnul Khuluk menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat. Ia menilai permasalahan yang terjadi erat kaitannya dengan upaya mewujudkan swasembada pangan yang menjadi target pemerintah pusat.

Ia menjelaskan bahwa secara jadwal, pengadaan bisa saja baru terealisasi tahun 2027, namun kebutuhan warga yang mendesak mendorongnya untuk mencari percepatan solusi. Politisi PKS dari daerah pemilihan Jember-Lumajang itu juga menyoroti pentingnya pengaturan pola tanam yang serentak guna menekan populasi hama. Ia mendesak pemerintah agar hadir aktif dalam mengatur jadwal tanam petani.

“Kalau tanam serentak, insya Allah serangan hama bisa ditekan. Pemerintah harus turun tangan mengatur pola tanam,” tegasnya. Di sektor UMKM, warga juga menyampaikan kebutuhan akan mesin adonan untuk produksi kue donat dan olahan lainnya. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha kecil di desa tersebut.

“Kami biasa menggiling adonan ke luar desa. Kalau ada alat di desa, bisa lebih hemat dan efisien, bahkan bisa disewakan untuk warga lainnya,” ujar seorang pelaku UMKM. Khusnul menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menilai penguatan UMKM sangat penting bagi ketahanan ekonomi masyarakat desa. Sebagai bentuk dukungan nyata, ia menyatakan akan menggunakan dana pribadinya untuk membantu pengadaan alat adonan donat.

“Ini penting untuk kita support. Makanya alat adonan donat akan kita bantu dari anggaran pribadi,” pungkasnya. Khusnul juga mendorong adanya penyuluhan berkala tentang keseimbangan penggunaan pupuk kimia dan organik agar para petani tidak bergantung pada satu jenis pupuk saja. Ia berharap seluruh elemen, baik pemerintah pusat maupun daerah, bersinergi dalam menciptakan ekosistem pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.

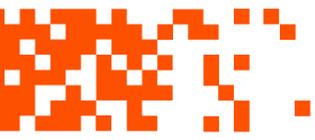
## TANGGAPI KOPERASI MERAH PUTIH YANG TUTUP USAI DIRESMIKAN, KHUSNUL KHULUK: PEMPROV HARUS TURUN DAN DAMPINGI

Sejumlah koperasi Merah Putih di Jawa Timur dilaporkan tidak berjalan bahkan ada yang tutup usai diresmikan, seperti terjadi di Kabupaten Tuban. Fenomena ini mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, yang menyoroti kurangnya kesiapan dan pendampingan sebagai akar persoalan.

Menurutnya, pembentukan koperasi banyak yang dilakukan hanya untuk memenuhi tuntutan program, bukan berdasarkan kebutuhan riil atau potensi desa. "Mereka diminta segera menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), lalu koperasi dibentuk tanpa rencana usaha yang matang. Rata-rata tidak punya simpanan pokok atau simpanan wajib," jelas anggota Fraksi PKS itu.

Khusnul mengapresiasi bantuan Pemprov Jatim berupa dana Rp4 miliar untuk pengurusan akta pendirian koperasi di kabupaten/kota yang mengalami kendala anggaran. Namun, ia menekankan bahwa legalitas bukan satu-satunya solusi.

***"Mayoritas koperasi Merah Putih ini memang sudah berbadan hukum. Tapi para pengurusnya bingung, mau menjalankan usaha apa. Karena dibentuk secara tergesa-gesa tanpa cikal bakal yang jelas," ujar Khusnul.***



“Yang paling penting adalah pendampingan dari Dinas Koperasi Provinsi. Mereka harus turun, melihat potensi lokal, lalu mengarahkan koperasi ke sektor yang sesuai. Kalau potensinya sembako ya diarahkan ke sana. Kalau ada tenaga medis, bisa buka klinik desa. Atau yang paling gampang, mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui dapur desa,” terang Khusnul.

Ia juga menyarankan agar koperasi bisa diarahkan menjadi agen elpiji atau usaha lainnya, selama tidak mematikan usaha warga yang sudah berjalan.

“Perlu kebijakan yang bijak dari pengurus desa. Jangan sampai koperasi Merah Putih justru mematikan toko sembako atau agen elpiji yang sudah lebih dulu ada. Harus ada kolaborasi, bukan persaingan,” tegasnya.

Khusnul juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi untuk membantu pendampingan, terutama di desa yang sumber daya manusianya terbatas.

“Bisa kerjasama dengan kampus, negeri atau swasta, agar tidak ada alasan kekurangan SDM dalam mengelola koperasi,” katanya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya sinergi antara koperasi Merah Putih dan BUMDes. “Koperasi jangan dianggap pesaing. Kalau BUMDes bergerak di peternakan ayam, koperasi bisa bantu menjual telur atau menyalurkan pakan dari perusahaan besar. Jadi semua bisa jalan bareng,” pungkas Khusnul.

Ia berharap ke depan, program koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi proyek simbolis, tapi benar-benar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa secara nyata dan berkelanjutan.

# FRAKSI PKS JAWA TIMUR



[www.fraksipksjatim.id](http://www.fraksipksjatim.id)



fraksipksjatim